

PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI SDN PANGARANGAN III KEC. KOTA SUMENEP KAB. SUMENEP

Rahmi Maulida, Hermanoadi,

Program Studi Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Gresik

ABSTRAK

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu masalah urgen dan dipandang perlu untuk mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini berhubungan erat dengan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Selain itu, di dalam meningkatkan mutu pendidikan harus memperhatikan seluruh aspek di suatu sekolah baik input, proses, maupun outputnya. Mutu pendidikan dipandang perlu untuk mengadakan pembenahan dan perubahan diberbagai sektor diantaranya kepemimpinan dan manajemen. Keberhasilan suatu sekolah hanya akan mampu dijalankan manajemen yang efektif, manajemen yang efektif hanya dapat dijalankan oleh kepemimpinan yang profesional. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemimpin sebagai manajer yaitu: merencanakan dan mengevaluasi, mengorganisasikan, pengarahan dan pengawasan, dan monitoring evaluasi yang berkesinambungan untuk aksi selanjutnya. Maka dari hal tersebut setiap satuan pendidikan wajib menjalankan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu suatu pendidikan di sekolah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan keseluruhan fungsi manajemen pendidikan yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. SDN. Pangarangan III Kec. Kota Sumenep merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sesuai indikator yang telah ditetapkan yaitu Delapan Standar Nasional Pendidikan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang peranan kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN. Pangarangan III Kec. Kota Sumenep dengan tujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kebijakan mutu pendidikan di SDN Pangarangan III Kec. Kota Sumenep. Kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan mutu output pendidikannya dengan memfokuskan tiga, standar nasional pendidikan yaitu standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar sarana prasarana. (2) Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan ada lima yaitu Penetapan standar, pementaan mutu, penyusunan perencanaan pemenuhan, pelaksanaan mutu dan evaluasi mutu.

Kata Kunci: Peranan Kepemimpinan, Mutu Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

a. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah mutu pendidikan merupakan isu sentral dalam pendidikan nasional terutama terkait dengan rendahnya mutu pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Di ASEAN bidang pendidikan di Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga. Dari 10 negara yang ada, Indonesia menduduki peringkat 5, dan masih kalah dengan dengan negara terdekat seperti : Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia atau Thailand. Tuntutan peningkatan mutu dalam dunia pendidikan merupakan bagian dari

pertanggungjawaban publik. Hal ini terjadi karena dalam dunia yang semakin berkembang secara global menuntut pengelolaan bidang pembangunan dilakukan dengan transparan dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kualitas pendidikan dipandang perlu untuk mengadakan pembenahan dan perubahan di berbagai sektor terutama manajemen sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Apabila dikaji lebih dalam menurunnya mutu pendidikan, maka bisa dilihat diantaranya bagaimana peranan kepemimpinan kepala sekolah dan sistem manajemen yang dipergunakan di

sekolah, baik yang menyangkut kegiatan pembelajaran manajemen sekolah, dan partisipasi masyarakat. Menurut Kusuma (2007) sebaiknya pendidikan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab secara rasional, sosial, dan moral. Secara rasional sistem pendidikan yang dijalankan demi mengejar ketertinggalan zaman atau tuntutan untuk memakai peradaban modern dapat diterima namun jangan sampai mengesampingkan aspek sosial, dan moral kemanusiaan. Keseimbangan ini karena akan sangat berpengaruh pada kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Peranan kepemimpinan (kepala sekolah) dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan permasalahan yang sangat penting, karena keberhasilan pendidikan diantaranya sangat ditentukan oleh pengelola manajemen yang baik. Peranan kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang paling dominan dan sangat penting dalam manajemen, sebab tanpa adanya manajemen yang baik, maka peningkatan mutu pendidikan tidak akan tercapai dengan baik dan maksimal.

Keberhasilan suatu sekolah hanya akan mampu dijalankan oleh manajemen yang efektif untuk pengembangan dan merespon dengan cepat dan tepat segala tuntutan dan kebutuhan perubahan masyarakat. Kepala sekolah harus mengupayakan sistem yang memberdayakan semua warga terhadap komunikasi kompensasi, evaluasi, disiplin, kebijakan, personal, seleksi, promosi, informasi, pelatihan, dan pengembangan karier. Pemberdayaan sumber daya manusia agar dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepala sekolah harus memiliki kreatifitas untuk melakukan upaya - upaya pemberdayaan terhadap stafnya dalam hal misalnya: menyusun visi misi, tujuan, dan strategi yang jelas dan dapat diterima warganya.

Untuk meningkatkan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Setiap satuan pendidikan wajib menjalankan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu suatu pendidikan di sekolah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan keseluruhan fungsi manajemen pendidikan yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mengukur dan menilai

pemenuhan standar mutu. SDN. Pangarangan III Kec. Kota Sumenep merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang sesuai indikator yang telah ditetapkan yaitu Delapan Standar Nasional Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan, melaksanakan penjaminan mutu yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan yang terdiri atas pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monev, dan analisis mutu pendidikan. Dalam melaksanakan Sistem ini SDN. Pangarangan III Kec. Kota Sumenep juga mempunyai organisasi atau tim yang bertugas dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang disebutkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan tesis ini tentang: "Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)".

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui peranan kepemimpinan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan melalui Manajemen Berbasis Rapor Mutu :

- a. Untuk mengetahui peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Untuk mengetahui strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : a) Manfaat teoritis, Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pemimpin (kepala sekolah) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dengan menggunakan konsep Manajemen Berbasis Rapor Mutu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana baru bagi kepala sekolah dan *stakeholder* untuk

mengadakan pembenahan dan perubahan di satuan pendidikannya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. b) Manfaat Praktis,

- 1) Bagi Peneliti dan Kepala Sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan sekolah, meningkatkan kompetensi manajemen sekolah, dan sebagai bahan masukan mengembangkan manajemen dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
- 2) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mengimplementasikan melalui Manajemen Berbasis Rapor Mutu, untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan bersama sesuai visi dan misinya. Bagi sekolah, sebagai masukan sehingga mampu meningkatkan peranan Kepala Sekolah baik menyangkut perannya sebagai kepemimpinan (leadership) dan manajerial dalam memperbaiki kinerjanya, agar lebih efektif, efisien, aktif, kreatif, dan inovatif dalam rangka meningkatkan mutu sekolah yang diembannya dan meningkatkan kepedulian *stakeholder*, partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya.
- 3) Bagi *stakeholder*, penelitian ini dapat meningkatkan kepedulian dan peran serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dan terbiasa memotivasi diri dan berpartisipasi aktif.

b. KERANGKA TEORI

2.1 Teori Kepemimpinan (Kepala Sekolah)

Kepemimpinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal pemimpin, cara memimpin maksudnya orang yang memimpin ditunjuk dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan melibatkan orang lain pada suatu kelompok atau organisasi tempat pemimpin dan anggotanya berinteraksi. Dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin serta adanya tujuan bersama yang harus dicapai. Tugas seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada

kemampuannya melaksanakan program – program, tetapi juga melibatkan seluruh lapisan dalam organisasi, anggota, masyarakat untuk berperan aktif sehingga mereka memberikan kontribusi positif dalam usaha mencapai tujuan.

Pemimpin yang efektif adalah seseorang yang dengan kekuasaannya mampu menggugah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Seorang pemimpin yang berhasil di dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya tentu memerlukan kriteria - kriteria tertentu yang merupakan faktor pendukung keberhasilannya, yang meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam dirinya, seperti sifat, kemampuan pribadi (keahlian dan kemampuan), maupun motivasi untuk berprestasi pada diri pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang ada di luar diri pemimpin, seperti hubungannya dengan orang lain maupun dukungan orang - orang di sekelilingnya (sifat-sifat kepribadian pengikut).

Untuk mewujudkan sekolah yang efektif dan pembelajaran yang berkualitas kepemimpinan kepala sekolah yang efektif harus mampu memainkan perannya.

Sebagai tolok ukur keberhasilan pemimpin pada hakekatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terlibat terhadap kedua orientasi, yaitu apa yang telah dicapai oleh organisasi dan pembinaan terhadap organisasi.

Membangun sekolah efektif artinya merumuskan apa yang harus dicapai dan apa yang harus dikerjakan. Maksudnya sasaran pengembangan sekolah dirancang dan dilaksanakan dengan mengedepankan ekspektasi yang tinggi, sehingga cita - cita sekolah yang telah dirumuskan melalui visi misi dapat dicapai secara efektif.

Sekolah dikatakan efektif apabila terdapat hubungan yang kuat antara apa yang telah dirumuskan untuk dikerjakan dengan hasil yang telah dicapai. Pencapaian sekolah efektif dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan menggerakkan semua sumber daya yang ada dan melakukan pengelolaan dengan menggunakan standar yang baik, transparan, resposibel, dan akuntabel yang diarahkan untuk tercapainya visi dan misi sekolah.

Dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) disebutkan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki kualitas atau mutu yang dapat dilihat dari input, proses, dan output. Namun

kadang konsep dasar yang terbangun tentang sekolah efektif cenderung terkonsentrasi pada indikator - indikator kuantitatif yang menekankan pada output, khususnya yang berkaitan dengan hasil ujian atau yang berhubungan dengan prestasi belajar siswa.

Input berkaitan dengan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan proses adalah kejadian berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, dan output adalah merupakan kinerja sekolah yang dapat diukur dari kualitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.

2.2 Peningkatan Mutu Pendidikan

Makna mutu pendidikan, kata “mutu” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kualitas yaitu kepuasan penerima jasa pendidikan terhadap layanan pendidikan. Sallis (2005) dalam buku Pengembangan Manajemen Sekolah yang dikutip Cepi Triatna (2015:51) mendefinisikan mutu pendidikan dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut dan mutu relatif.

Mutu pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat produktifitas hasil (*output*). Hal ini sangat erat hubungannya dengan manajemen. Sekolah sebagai suatu organisasi, dalam memperbaiki kualitas tidak dapat hanya memperhatikan salah satu aspek saja tetapi menyangkut seluruh aspek di sekolah tersebut. Dikarenakan produk yang baik akan dipengaruhi oleh suatu proses yang baik, proses yang baik dipengaruhi oleh organisasi atau manajemen yang baik, manajemen yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang profesional serta didukung dengan komitmen bersama dalam suatu team.

Latar belakang perlunya peningkatan mutu sekolah, merupakan persoalan penyelenggaraan sekolah saat ini menjadi sorotan banyak pihak, tidak saja orangtua peserta didik, tetapi juga pemerintah, dunia usaha dan industri, organisasai kemasyarakatan, pemerhati pendidikan, dan masyarakat secara luas. Yang menjadi sorotan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan saat ini adalah rendahnya manajemen sekolah dalam memfasilitasi layanan pembelajaran yang bermutu, hasil pendidikan yang jauh dari harapan, dan dampak pendidikan yang dirasakan tidak memuaskan oleh para pemangku kepentingan sekolah (*stakeholders*). Kompleksitas dan keunikan dalam dunia pendidikan menuntut adanya peran pemimpin

pendidikan yang sangat fundamental dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan.

Hal-hal penting yang berkaitan erat dan berpengaruh dan saling menguatkan terhadap keberhasilan peningkatan mutu pendidikan yaitu: produk yang merupakan tujuan serta pencapaian organisasi. Mutu produk tidak mungkin ada tanpa mutu dalam proses. Mutu dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak mungkin ada tanpa adanya pemimpin yang memadai. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pendukungnya.

2.3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Secara kelembagaan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan regulasi. SPMP dalam kegiatannya fokus terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. SPMP dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan untuk mencapai akuntabilitas satuan pendidikan terhadap masyarakat atau publik.

Secara umum penjaminan mutu satuan pendidikan/sekolah merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan satuan pendidikan/sekolah secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh pemakai lulusan (*stakeholders*) memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*). Berkenaan dengan konsep penjaminan mutu di atas, maka satuan pendidikan (sekolah) harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan mutu, baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam kegiatan pendidikan yang diselenggarakan.

Penjaminan mutu pendidikan formal, nonformal, dan informal sebagaimana tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan Mutu Pendidikan, merupakan kegiatan yang sistematis dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan terutama berada pada satuan/program pendidikan. Penyelenggara satuan/program pendidikan berkewajiban

menyediakan dan memberikan bantuan dalam memenuhi standar yang diharapkan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Dalam implementasinya sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah ditunjang oleh sistem informasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti terlihat pada gambar 1.

Gambar 1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah



Perihal penjaminan mutu diatur oleh peraturan pemerintah No. 19/2005, pasal 91:

- Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- Penjaminan mutu pendidikan dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu orgram penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Selanjutnya pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan atau sauan pendidikan. Apa yang menjadi esensi akreditasi adalah sebagai bentuk bentuk Akuntabilitas Publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendiidikan.

Standar Nasional Pendidikan mencakup:

- Standar Isi
- Standar Proses
- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Pendiidk dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana

- Standar Pembiayaan Pendidikan
- Standar Penilaian

Ruang lingkup penjaminan mutu pendidikan mencakup seluruh tahapan dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu, mulai dari tahap perumusan Regulasi dan Penetapan Standar, pemenuhan Standar, Pengukuran dan Evaluasi, Perbaikan dan Pengembangan Standar yang mengacu pada pemenuhan SNP atau melampaui SNP pda jalur pendidikan formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

c. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis fenomenologi, di mana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas, serta data yang dihasilkan berupa deskriptif bukan angka-angka. Analisis yang cocok untuk digunakan oleh peneliti adalah analisis kualitatif (non statistik) sesuai tujuan dan maksud penelitian di bidang pendidikan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan keefektifan produk yang digunakan di sekolah tentang sistem manajemen yang diharapkan untuk peningkatan mutu pendidikan Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002 : 3) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena. Menurut Sugiono (2010 :1) penelitian kualitatif adalah penelitian yang obyeknya bersifat alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna.

3.2 Sumber Data

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku yang terlibat langsung dan benar-benar tahu dan menguasai masalah. Pelaku adalah Kepala Sekolah dan Guru SDN. Pangarangan III, yang terletak di Desa Pangarangan Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Teknik pengumpulan data merupaka salah satu bagian terpenting dalam penelitian.

3.3 Analisis Data

Dalam tesis ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: a) Obsevasi, peneliti menggunakan teknik observasi agar dapat mengamati secara realistik tentang peranan kepemimpinan (Kepala Sekolah)

dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan konsep MBS di SDN. Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, b) Metode Dokumentasi, Dokumentasi diperlukan agar peneliti dapat memperoleh data lainnya yang tersimpan dalam bentuk dokumen seperti catatan harian, foto, dan lain sebagainya, c) Metode Wawancara, Metode wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bebas, di mana pewawancara dapat menanyakan informasi data yang dibutuhkan dan dikumpulkan sesuai dengan fokus penelitian yang akan dilakukan.

d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peranan Kepemimpinan dalam Mengelola Manajemen untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Berdasarkan paparan hasil penelitian tentang “Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. Peranan kepemimpinan kepala sekolah merupakan bagian terpenting yang sangat berpengaruh dalam sebuah manajemen di samping fungsi-fungsi yang lain.

Keberhasilan suatu sekolah dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan menjadi sekolah yang berprestasi baik bidang non akademik maupun akademik dengan mengintegrasikan pendidikan akhlaq mulia/karakter menjadi *branding* dalam meningkatkan mutu sekolah tidak terlepas dari peranan kepemimpinan dan team yang kuat. Dalam meningkatkan mutu sekolah tersebut banyak dipengaruhi dari bagaimana seorang pemimpin menjalankan perannya yang utama yaitu sebagai leader dan manajer, sedangkan peran yang lain sebenarnya sudah tercakup di dalamnya. Secara keseluruhan di antaranya sebagai : educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, mediator, pencipta iklim kerja, dan wirausahaan.

Peningkatan mutu yang terjadi di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, juga dikarenakan: memiliki visi dan misi yang kuat, punya harapan yang tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja warga sekolah, memprogramkan dan melakukan monitoring evaluasi terhadap kinerja guru dan karyawan serta memberikan umpan balik yang positif. Menejemen waktu yang efektif, mendayagunakan berbagai sumber yang ada secara kreatif, produktif, dan akuntabel, memantau kemajuan, dan

melakukan evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan. Dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menjadi lebih efektif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut, di samping adanya Sistem Penjaminan Mutu Ekstern (SPME).

4.2 Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Raport Mutu

a. Kebijakan Mutu

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan harapan dan dambaan bagi setiap warga negara. Masyarakat baik yang terorganisir dalam suatu lembaga pendidikan, maupun orang tua/wali murid sangat berharap agar murid dan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang bermutu agar nanti dapat bersaing dalam menjalani kehidupan. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan berupa program atau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Kebijakan mutu pendidikan dibuat secara bersama agar tidak merugikan pihak yang lain. Kebijakan ini terpacu pada delapan SNP yang masing-masing memiliki kebijakan tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sutarjo “Dari delapan Standar Nasional Pendidikan kami mengambil tiga poin terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana Prasarana”.

1) Standar Proses

Standar proses merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang diselenggarakan harus secara interaktif, inspirasi, menyenangkan, menantang, memotivasi, serta memberikan ruang cukup untuk kreativitas dan kemandirian. Di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep ini dalam proses belajar mengajar sudah bisa dibilang baik.

Proses belajar mengajar di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep sebagai pelaksana kebijakan Standar nasional pendidikan yang dalam menjalankannya melalui perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat diawal smester dengan membuat RPP dan silabus. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan melalui pembukaan pembelajaran dengan do'a, menyisipkan motivasi, menggunakan media belajar serta menutupnya dengan salam serta untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep memiliki beberapa kebijakan seperti tata tertib bagi guru maupun karyawan dan siswanya. Untuk proses penilaian, penilaian dilakukan sesuai dengan Standar penilaian yang telah ditentukan. Sedangkan untuk pengawasan pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah dan supervisi dari dinas pendidikan.

Adapun tata tertib bagi guru dan karyawan meliputi Datang ke sekolah sesuai jam kerja, mengisi daftar hadir, izin jika berhalangan, memakai pakaian yang rapi dan sopan, setiap hari senin mengikuti upacara bendera, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, dan wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lingkungan sekolah.

Sedangkan tata tertib untuk siswa yaitu sepatu wajib hitam, pramuka wajib, datang maksimal 15 menit sebelum bel, berjabat tangan dengan guru, berdo'a dengan Asmaul Husna.

2) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep memiliki beberapa kebijakan guna memiliki Standar kompetensi lulusan atau *output* yang bermutu dan berkompotensi di bidangnya. Kebijakan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa.

Sekolah mengeluarkan kebijakan dalam kemampuan Sikap melalui pendidikan karakter yang di balut dalam bentuk tulisan, pembiasaan, maupun lisan. Dari bentuk tulisan SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep ada program Literasi yang diikuti oleh semua siswa, satu anak satu karya tulisan. Pembiasaan, sekolah mengajarkan untuk berjabat tangan dengan guru. Lisan, siswa di anjurkan berkata dengan

baik dan sopan. Selain itu terdapat slogan Tiga S (senyum, sapa, salam).

Sedangkan untuk mendapatkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep memiliki beberapa kebijakan sebagai berikut *Pertama*, penerapan sekolah berbasis budaya Sekolah berbasis budaya SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep mewujudkannya melalui mata pelajaran tari dan bahasa daerah yang dimasukkan menjadi salah satu pelajaran di dalam kelas. Mata pelajaran tari ini khusus untuk tari-tari tradisional dan dalam pelajarannya guru juga menggunakan bahasa Madura.

Sekolah berbasis budaya tersebut dimaksudkan agar siswa dan warga sekolah menghargai dan sadar akan kekayaan bangsa dan bahasa Indonesia *Kedua*, sekolah Adiwiyata, sekolah adiwiyata yang merupakan program kementerian lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Mewujudkannya dengan program cinta lingkungan yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah dalam bentuk pelestarian, perawatan dan penggunaan media hijau. Hal ini bertujuan agar memperkaya pengetahuan baik dalam bidang budaya maupun lingkungan dan untuk dapat mengimplementasi kompetensi lulusan yang bermutu.

Kompetensi lulusan yang bermutu selain dalam sikap dan pengetahuan juga harus mencakup keterampilan. SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep memiliki kebijakan melalui pendidikan pengembangan bakat siswa. Pendidikan pengembangan bakat siswa merupakan pendidikan yang difokuskan pada bakat yang dimiliki oleh siswa yang diawasi langsung oleh guru maupun pembina. Para guru ditugaskan untuk terjun langsung mengawasi dan mendampingi siswa dalam menggali, mengasah, maupun menemukan bakat dalam diri yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, penanaman pendidikan tersebut juga dapat melatih siswa untuk berbesar hati dan bersemangat apabila ingin mencapai sesuatu. Hal tersebut ditanamkan melalui lomba-lomba yang diadakan oleh pihak sekolah maupun pihak luar sekolah yang diikuti siswa-siswi kelas secara bergantian.

Sekolah juga memfasilitasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih

siswa untuk menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa seperti Pramuka. Sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep menyediakan kegiatan sebagai berikut seperti tari, voley, basket, bulutangkis, pmr, pks, dewan penggalang.

SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dalam arti umum tidak hanya mengeluarkan/output lulusan yang ahli umum saja melainkan dalam hal pendidikan agama juga baik. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sudartina, S.Pd.I sebagai guru mapel pendidikan agama dan budi pekerti "Meskipun hanya ada dua guru PNS di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep ini kami mengambil kebijakan untuk mengambil guru dari luar, mentor-mentor yang profesional". Pendidikan Agama dan Budi pekerti ini merupakan unggulan di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep. Terdapat program tahfidz yang dilaksanakan setiap hari. Bentuk kegiatannya jum'at jam 6 pagi sampai jam 7 dan ada pembinaan intensif.

3) Standar Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana prasarana di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep tergolong lengkap dengan memiliki beberapa fasilitas seperti ruang kelas yang dilengkapi LCD, perpustakaan yang memiliki buku terbaru serta laboratorium IPA yang lengkap, lab komputer, uks, pramuka, tempat ibadah. SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep memiliki beberapa kebijakan yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sarana prasarana. *Pertama*, Kebijakan yang mengharuskan mengisi daftar peminjaman. *Kedua*, Pewajiban pemaksimalan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep seperti perpustakaan, lab TIK, aula dan lain sebagainya.

Tujuan dari sebuah kebijakan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep seperti halnya siswa yang bandel, berplilaku menyimpang. Atau masalah-masalah lainnya, seperti dalam hal kurikulum dll.

Dari semua paparan data di atas tentang kebijakan mutu pendidikan di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep sesuai dengan teori kebijakan mutu pendidikan bahwa dalam kebijakan

pendidikan mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan. Delapan Standar Nasional Pendidikan ini memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri. Yang membedakan di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep adalah dalam meningkatkan mutu pendidikan SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep mengambil tiga dari delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana Prasarana.

e. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan analisis data tentang "Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep" menunjukkan, 1) Kepala Sekolah telah melaksanakan peran utamanya sebagai *leader* dan *manajer* dengan baik, di samping peran yang lainnya adalah seorang wirausahawan yang tangguh dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai seorang wirausahawan yang tangguh, pekerja keras dan cerdas kreatif, inovatif, komitmen dan berusaha memberikan teladan bagi warga sekolahnya. 2) Kebijakan mutu pendidikan di SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang terfokus pada tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana dan Prasarana. 3) Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan terdiri dari lima langkah, yaitu Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Mutu, Evaluasi mutu dan Penetapan standar.

Semoga dengan adanya fasilitas yang lengkap bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan mengeluarkan peserta didik yang unggul dalam hal umum maupun agama. Untuk Siswa-siswi SD Negeri Pangarangan III Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep semoga menjadi lulusan yang baik seperti yang diharapkan sekolah. dengan mentaati peraturan-peraturan atau kebijakan yang telah di berikan oleh sekolah maka akan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik.

Selain itu Kepala sekolah dan pemangku kepentingan, dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan agar lebih memaksimalkan dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin dan manajer sebagai tugas utamanya selain peran lain yang mendukungnya, memberdayakan sumber

daya yang ada, pendokumentasian yang tertib dan baik, meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan stakeholder. Menyusun rencana strategis untuk menggapai tujuan yang diharapkan, memonitoring dan mengevaluasi untuk aksi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basri, Hasan & Tatang S. 2015. *Kepemimpinan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kemdikbud. 2017. *Petunjuk teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan*. Jakarta
- Kompri. 2014. *Manajemen Sekolah Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Rohiat. 2008. *Kecerdasan Emosional Kepemimpinan Kepala sekolah*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Supriono S, dkk. 2001. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jatim: IKAPI
- Triatna, Cepi. 2015. *Pengembangan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya